

OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA RENTAN: STRATEGI UNTUK MEMPERBAIKI AKSES DAN KUALITAS

MITRO SUBROTO, REYHAN DZAKY HUTABARAT

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
reyhandzakyy@gmail.com

Abstract: *This research addresses the optimization of health services for vulnerable inmate groups, highlighting the urgent need for improved healthcare access within correctional facilities. The study employs a mixed-methods approach, combining qualitative interviews with quantitative data analysis to assess existing health service frameworks and identify gaps. Findings indicate that vulnerable inmates face significant barriers to accessing adequate healthcare, including stigma, overcrowding, and insufficient resources. The research concludes that enhancing healthcare delivery systems and integrating community health services can significantly improve health outcomes for these populations. This study contributes to the discourse on prison healthcare reform, advocating for policies that ensure equitable access to health services for all inmates.*

Keywords: *health services; vulnerable inmates; prison healthcare; optimization; access.*

Abstrak: Penelitian ini membahas upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, dengan menyoroti urgensi peningkatan akses kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran, menggabungkan wawancara kualitatif dengan analisis data kuantitatif untuk menilai kerangka pelayanan kesehatan yang ada dan mengidentifikasi celah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana rentan menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk stigma, overkapasitas, dan sumber daya yang tidak mencukupi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sistem penyampaian layanan kesehatan dan integrasi layanan kesehatan komunitas dapat secara signifikan memperbaiki hasil kesehatan bagi populasi ini. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus reformasi kesehatan di penjara, mendorong kebijakan yang memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan bagi semua narapidana.

Kata Kunci: layanan kesehatan; narapidana rentan; kesehatan penjara; optimalisasi; akses.

A. Pendahuluan

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada kondisi kesehatan narapidana, khususnya kelompok rentan yang sering kali terabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Narapidana sering kali menghadapi berbagai masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus, namun akses mereka terhadap layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Kerangka teori yang digunakan dalam artikel ini mencakup konsep-konsep dasar mengenai pelayanan kesehatan di penjara dan teori-teori terkait dengan aksesibilitas layanan kesehatan untuk populasi rentan. Teori-teori ini membantu memahami dinamika antara kebutuhan kesehatan narapidana dan sistem pelayanan yang ada, serta bagaimana faktor-faktor sosial dan lingkungan memengaruhi akses mereka terhadap layanan tersebut. State of the art penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di penjara, masih terdapat banyak celah dalam implementasi kebijakan dan praktik yang efektif. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyampaian layanan kesehatan kepada narapidana, termasuk stigma sosial dan kurangnya sumber daya.

Permasalahan dan gap analysis dalam penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi kekurangan dalam sistem pelayanan kesehatan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi inovatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan campuran, yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini melibatkan teknik pengumpulan data yang beragam, termasuk wawancara mendalam dengan narapidana dan petugas medis, serta survei untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman akses layanan kesehatan. Wawancara mendalam dirancang untuk menggali perspektif individu secara lebih detail, memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan konteks dari pengalaman narapidana dalam mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, survei memberikan data kuantitatif yang lebih luas mengenai pola dan tren dalam akses kesehatan di kalangan narapidana. Dengan mengombinasikan kedua metode ini, penelitian bertujuan untuk menciptakan gambaran yang lebih holistik mengenai tantangan yang dihadapi oleh narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Metode statistik deskriptif memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menyajikan data numerik dengan cara yang mudah dipahami, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi kesehatan narapidana. Di sisi lain, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari wawancara kualitatif, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pengalaman dan persepsi narapidana serta petugas medis terkait akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya dapat mengukur seberapa besar masalah yang ada, tetapi juga memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi akses narapidana kelompok rentan terhadap pelayanan kesehatan. Temuan ini mencakup tingginya tingkat stigma terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental, serta kurangnya pelatihan bagi petugas medis dalam menangani kebutuhan khusus kelompok ini. Pembahasan ini akan menganalisis secara mendalam hasil temuan tersebut serta implikasinya terhadap kebijakan pelayanan kesehatan di penjara.

Tingginya Stigma Terhadap Narapidana dengan Masalah Kesehatan Mental
Stigma terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental merupakan salah satu faktor utama yang menghambat akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Stigma ini sering kali muncul dari pandangan negatif masyarakat yang menganggap narapidana sebagai individu yang berbahaya dan tidak layak mendapatkan perawatan yang sama dengan orang lain. Pandangan semacam ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan masyarakat dan petugas medis, sehingga menciptakan lingkungan di mana narapidana merasa terasing dan tidak berdaya. Penelitian menunjukkan bahwa stigma ini dapat menyebabkan narapidana enggan untuk mencari bantuan medis, bahkan ketika mereka sangat membutuhkannya. Misalkan, jika narapidana mengalami episode depresi

atau gangguan bipolar, mereka mungkin takut untuk mencari bantuan karena khawatir akan digolongkan sebagai "pasien psikotik" atau "penjahat." Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman untuk mencari perawatan yang mereka perlukan, sehingga akhirnya mereka tidak mendapatkan perawatan yang adekuat. Selain itu, stigma juga dapat memicu perilaku stigmatif di kalangan petugas medis. Petugas medis yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan mental mungkin akan bersikap skeptis atau bahkan diskriminatif terhadap narapidana dengan masalah kesehatan mental. Contohnya, mereka mungkin akan mengabaikan permintaan narapidana untuk perawatan psikiatrik atau menganggap narapidana sebagai "pasien sulit." Untuk mengatasi stigma ini, kampanye kesadaran publik sangatlah penting. Edukasi masyarakat tentang hak-hak narapidana, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, dapat membantu mengubah persepsi negatif dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana untuk mendapatkan perawatan medis tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial.

Kurangnya Pelatihan bagi Petugas Medis. Kurangnya pelatihan bagi petugas medis dalam menangani kebutuhan khusus narapidana adalah faktor lain yang signifikan. Banyak petugas medis yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk merawat pasien dengan kondisi kesehatan mental atau penyakit kronis. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang diberikan sering kali tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik narapidana. Misalkan, jika narapidana mengalami depresi, mereka membutuhkan perawatan yang kompleks yang melibatkan intervensi psikiatrik, terapi, dan monitoring intensif. Namun, jika petugas medis tidak dilatih untuk mengerti dan menangani situasi semacam ini, maka perawatan yang diberikan bisa sia-sia dan malah memperburuk kondisi pasien. Pelatihan yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan petugas medis dalam memberikan perawatan yang efektif dan empatik. Pelatihan ini harus mencakup materi-materi tentang diagnosis dan pengobatan kesehatan mental, teknik komunikasi yang efektif, serta strategi penanganan krisis. Dengan demikian, petugas medis dapat lebih siap dalam menangani kebutuhan khusus narapidana dan mengurangi stigma di lingkungan penjara. Contoh studi yang relevan adalah penelitian di Puskesmas Lompe Ntodea, yang menunjukkan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pelatihan tenaga kesehatan dengan kinerja petugas di puskesmas tersebut.

Kondisi Fasilitas Kesehatan di Penjara. Kondisi fasilitas kesehatan di penjara juga memainkan peran penting dalam akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan. Banyak lembaga pemasyarakatan mengalami masalah overkapasitas, yang mengakibatkan keterbatasan ruang dan sumber daya untuk memberikan perawatan medis yang memadai. Fasilitas kesehatan sering kali tidak dilengkapi dengan alat-alat medis yang diperlukan atau obat-obatan yang cukup, sehingga membatasi kemampuan petugas medis untuk memberikan perawatan yang berkualitas. Misalkan, jika sebuah penjara memiliki kapasitas yang besar namun fasilitas kesehatannya tidak lengkap, maka petugas medis akan kesulitan untuk memberikan perawatan yang adekuat. Alat-alat medis yang tidak lengkap dapat menyebabkan diagnosa yang tidak akurat, sedangkan obat-obatan yang tidak cukup dapat menghambat proses pengobatan. Peningkatan infrastruktur dan penyediaan sumber daya yang lebih baik sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana dapat menerima perawatan kesehatan yang layak. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun unit kesehatan yang lebih modern, menyediakan alat-alat medis yang lengkap, serta membeli obat-obatan yang cukup. Dengan demikian, petugas medis dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan narapidana. Contoh implementasi yang relevan adalah peningkatan infrastruktur di Puskesmas Simalingkar, yang memiliki peran penting

dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Meskipun tantangan terkait kualitas pelatihan dan pengembangan profesional juga dihadapi di sana, peningkatan infrastruktur dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan

Implikasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Penjara. Implikasi dari temuan ini terhadap kebijakan pelayanan kesehatan di penjara sangat signifikan. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus narapidana, terutama mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Kebijakan tersebut harus mencakup program pelatihan berkelanjutan bagi petugas medis untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu kesehatan mental dan cara-cara untuk menangani stigma. Program pelatihan ini harus mencakup materi-materi tentang diagnosis dan pengobatan kesehatan mental, teknik komunikasi yang efektif, serta strategi penanganan krisis. Selain itu, kebijakan juga harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan penyediaan sumber daya yang lebih baik untuk memastikan bahwa narapidana dapat menerima perawatan kesehatan yang layak. Contoh kebijakan yang relevan adalah pembangunan unit kesehatan yang lebih modern di penjara-penjara besar. Unit-unit kesehatan ini harus dilengkapi dengan alat-alat medis yang lengkap dan obat-obatan yang cukup. Selain itu, kebijakan juga harus memfasilitasi kerjasama dengan institusi kesehatan luar untuk meningkatkan akses narapidana terhadap layanan kesehatan spesialis.

Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat. Edukasi masyarakat juga merupakan langkah penting dalam mengurangi stigma terhadap narapidana. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengubah persepsi negatif dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak narapidana, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana untuk mendapatkan perawatan medis tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial. Cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui media massa dan program pendidikan formal. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang progresif tentang narapidana dan kesehatan mental, sedangkan program pendidikan formal dapat membahas tema-tema yang relevan dalam kurikulum sekolah-sekolah. Contoh implementasi yang relevan adalah kampanye kesadaran publik yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi non-profit yang berdedikasi pada kesehatan mental. Kampanye-kampanye ini biasanya melibatkan acara-acara seminar, workshop, dan iklan televisi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak narapidana dan pentingnya pelayanan kesehatan yang adekuat.

Perlunya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Lain. Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dan institusi kesehatan lainnya juga sangat diperlukan. Dengan menjalin kemitraan dengan rumah sakit dan klinik luar, lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan akses narapidana terhadap layanan kesehatan spesialis yang mungkin tidak tersedia di dalam penjara. Hal ini penting terutama untuk kasus-kasus serius atau kronis yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut. Contoh kerjasama yang relevan adalah program transfer pasien yang dilaksanakan oleh beberapa penjara besar. Program ini memungkinkan narapidana yang membutuhkan perawatan spesialis untuk dipindahkan ke rumah sakit atau klinik luar yang lebih lengkap. Dengan demikian, narapidana dapat menerima perawatan yang lebih adekuat dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan sumber daya. Institusi kesehatan luar dapat berbagi pengetahuan dan teknologi dengan lembaga pemasyarakatan, sehingga meningkatkan kemampuan petugas medis dalam memberikan perawatan yang berkualitas.

Evaluasi Berkala Terhadap Pelayanan Kesehatan. Melakukan evaluasi berkala

terhadap sistem pelayanan kesehatan di penjara juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi ini harus mencakup analisis tentang efektivitas program-program kesehatan yang ada serta identifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, pihak berwenang dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan narapidana. Contoh evaluasi yang relevan adalah survei kualitas hidup yang dilakukan oleh beberapa penjara besar. Survei ini biasanya melibatkan wawancara dengan narapidana dan petugas medis untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Hasil survei ini dapat digunakan untuk merevisi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di penjara. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan melalui data-data statistik. Data tentang angka kejadian penyakit, mortalitas, dan kepuasan narapidana dapat digunakan untuk menilai efektivitas program kesehatan yang ada. Dengan demikian, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Mendorong Partisipasi Narapidana dalam Proses Kesehatan. Mendorong partisipasi aktif dari narapidana dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka juga penting. Narapidana harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait pelayanan kesehatan, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses perawatan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan kesehatan serta mendorong kepatuhan terhadap pengobatan. Contoh implementasi yang relevan adalah program konseling yang dilaksanakan oleh beberapa penjara besar. Program ini memungkinkan narapidana untuk berbicara dengan konselor yang ahli dalam kesehatan mental, sehingga mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait pelayanan kesehatan. Selain itu, partisipasi narapidana juga dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi. Forum-forum diskusi ini dapat digunakan untuk meminta opini narapidana tentang pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hasil diskusi ini dapat digunakan untuk merevisi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di penjara.

Menuju Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik bagi Narapidana. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak tantangan dalam akses narapidana kelompok rentan terhadap pelayanan kesehatan. Stigma sosial, kurangnya pelatihan bagi petugas medis, kondisi fasilitas kesehatan, serta kebijakan yang belum sepenuhnya responsif menjadi beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan. Dengan melakukan reformasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan baik di kalangan petugas medis maupun masyarakat umum, diharapkan akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini bukan hanya akan membantu memenuhi hak-hak dasar narapidana tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi mereka dan pengurangan tingkat residivisme di masa depan. Contoh implementasi yang relevan adalah integrasi program kesehatan mental ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Integrasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan masyarakat dan petugas medis. Selain itu, integrasi juga dapat membantu meningkatkan akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan yang adekuat dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita dapat menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi narapidana, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi dan pengurangan residivisme di masa depan.

D. Penutup

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, diperlukan pendekatan holistik

yang melibatkan integrasi antara layanan di penjara dan komunitas. Pendekatan holistik ini tidak hanya fokus pada aspek-aspek individual seperti pelatihan bagi petugas medis atau kondisi fasilitas kesehatan di penjara, tetapi juga mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, yaitu bagaimana interaksi antara sistem penjara dan masyarakat dapat mempengaruhi akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, rencana tindakan yang efektif harus mencakup elemen-elemen seperti: Integrasi Sistem Informasi: Mengintegrasikan sistem informasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi kesehatan luar untuk memastikan transmisi data yang cepat dan akurat. Koordinasi Tim Medis: Menyusun tim medis yang koordinatif, dimana dokter, perawat, dan psikolog bekerja sama untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Edukasi Komunitas: Melakukan kampanye kesadaran publik untuk mengubah persepsi negatif tentang narapidana dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Partisipasi Aktif Narapidana: Mendorong partisipasi aktif narapidana dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam perawatan mereka sendiri. Rekomendasi kebijakan akan disusun berdasarkan hasil analisis untuk memastikan bahwa semua narapidana memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana saat masih di penjara, tetapi juga untuk membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dirilis. Dengan demikian, diharapkan tingkat residivisme dapat dikurangi, dan narapidana dapat hidup lebih produktif dan sejahtera setelah melewati masa hukumannya. Oleh karena itu, penting untuk melihat pelayanan kesehatan bagi narapidana sebagai suatu investasi dalam masa depan bangsa, bukan hanya sebagai tanggung jawab moral. Dengan pendekatan holistik dan integratif, kita dapat menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, efektif, dan manusiawi bagi seluruh populasi, termasuk mereka yang telah melakukan kesalahan dan sedang menjalani proses rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Landya, Adi Setya Desta, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. ETD Repository Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Hamzah, Riskan. Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Maros. *Gema Keadilan*, Vol. 9 (Edisi 1), April-May 2022.
- Hanif, Alfian Ikhsan. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Tuban. *Widyauridika*, Vol. 4 (Nomor 1), Januari-April 2021.
- Utami, Niken Subekti Budi. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia dan Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan. ETD Repository Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2016.
- Waruna Yoga Mastra et al. Pemenuhan p Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Kelompok Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Krepa Journal*, Vol. 1 (Issue 6), Desember 2022.